CIVITAS

Majalah LPM CIVITAS Tahun 2025



Indonesia di Era Kepemimpinan Prabowo: Negara Taman Bermain

Represi Terhadap Jurnalis Meningkat, Negara dalam Uji Demokrasi

PENGANTAR REDAKSI

SALAM PERS MAHASISWA!

Memasuki masa pemerintahan baru, isu efisiensi anggaran menjadi perhatian utama. Bagaimana negara mampu mengelola sumber daya yang terbatas, mengurangi kebocoran, serta memastikan setiap rupiah benar-benar tersalurkan untuk kepentingan rakyat, adalah tantangan besar yang tidak bisa dihindari. Transparansi, akuntabilitas, serta prioritas program pembangunan akan menjadi tolok ukur keberhasilan.

Di sisi lain, gejolak politik juga tak bisa diabaikan. Era Prabowo Subianto menghadirkan warna baru dalam lanskap politik Indonesia. Pergeseran koalisi, dinamika parlemen, hingga tarik menarik kepentingan antara elit dan rakyat menjadi pemandangan sehari-hari yang perlu dikritisi. Politik yang dinamis tentu bisa melahirkan inovasi, namun juga berpotensi menimbulkan instabilitas apabila tidak dikelola dengan bijak.

Melalui berbagai artikel, opini, dan analisis yang kami sajikan, kami berharap majalah ini dapat memberikan wawasan kritis sekaligus mendorong pembaca untuk lebih jernih melihat realitas yang sedang berlangsung. Efisiensi anggaran dan dinamika politik bukan hanya isu elite, melainkan menyangkut masa depan bangsa yang harus kita kawal bersama.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada para penulis, kontributor, dan pembaca yang senantiasa mendukung hadirnya majalah ini. Semoga edisi kali ini dapat menjadi bahan bacaan yang inspiratif sekaligus memperkaya perspektif kita semua.

Salam hangat,
Redaksi

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung : Rektor Universitas Merdeka Malang. **Penanggung Jawab :** Pimpinan Umum UKPM. **Pembina :** H. Rochmad Effendi B.H.Sc.M.si. **Pemimpin Umum :** Ilham Budi Raharja. **Pimpinan Redaksi :** Ilham Budi Raharja. **Redaksi Pelaksana :** Rayhan Arsyadilllah R. **Editor :** Wika Aldhamayanti, Arvin Ma'ruf, Nova Velinda Fitri. **Layouter :** Muhamad Argi Ferdiansyah, Mochamad Naufal Dava Raffialy. **Redaksi :** Fian Wahyu Firmansyah, Rayhan Arsyadilllah R, Dea Ramadhani, Caecilia Pelita Andini, Nabila Putri Larasati, Khairul, Maikel Zanambani, Agatha Octavianny Callista, Firdaus Surur Zamzamiyatna, Muhammad Daffa Nugraha, Faiz Afdhal, Nanda Ainun Najwa, Najma Awalia Rizkia F, Misael Petra, Astrit Carmelia Tonis, Novia Rahmawati, Hayunaji Haristya Muhammah, Ahmad Mulya Saputra, Khotimatul Maulidah, Kevin Khayla, Shelomita, Hendi Rela, Maharani Aisya, Reina, Antonia, Auliya, Gabriela, Luluk

Daftar Isi

2. Pengantar & Redaksi
3. Daftar Isi
4. Artikel Utama
6. Artikel Lepas
14. Opini
15. Features
29. Sastra Civitas

Indonesia di Era Kepemimpinan Prabowo: Negara Taman Bermain

Indonesia, sebuah negara besar di tengah khatulistiwa dengan sejarah panjangnya kala berjuang untuk menyingkirkan penjajahan dari tanah ibu pertiwi. “Orang bilang tanah kita tanah surga, Tongkat kayu dan batu jadi tanaman” sebuah penggalan lirik dari band Koes Plus untuk menggambarkan betapa ajaibnya negeri ini. Tidak dapat disangkal seberapa kaya bumi nusantara ini. Tanahnya yang begitu subur dan gembur menghidupi rakyatnya dengan luhur, airnya yang begitu segar dari hulu ke hilir, udaranya pun yang sangat sopan membelai kulit makhluk hidup yang tinggal. Bagi rakyatnya, Indonesia adalah surga yang dititipkan Tuhan untuk mereka.

Paragraf di atas adalah Indonesia di kitab-kitab dongeng masa lampau, bukan kenyataan yang dapat dengan bangga kita tunjukkan ke dunia. Kini Indonesia berada di kondisi yang mengenaskan. Pemegang amanat mengabaikan perintah rakyatnya sendiri. Rakyatnya saling mencekik satu sama lain. Indonesia 2045, adalah cita-cita besar yang dititipkan pada segenap nusa dan bangsa oleh para founding fathers, dengan harapan di tahun 2045 Indonesia berada di barisan negara maju. Lalu, apa yang dilakukan negara ini demi mencapai cita-cita tersebut? Selamat membaca

Penentu Arah yang Bertangan Darah dan Sang Baby Nepo

Indonesia kini telah sampai di kepemimpinan kedelapan di 2025 ini, sudah delapan puluh tahun negara ini berdiri sendiri, semakin dekat pula dengan cita-cita besarnya.



Sumber: x.com/prabowo

Prabowo Subianto, beliau nakhoda yang kini memegang kendali kemana negara ini akan berlabuh. Beliau telah sah secara hukum terpilih menjadi presiden pada 2024 lalu, meskipun dengan gonjang-ganjing yang menyertainya. Prabowo adalah seorang pensiunan jenderal Tentara Republik Indonesia, yang tentu memiliki sepak terjang yang tidak main-main. Begitu pula dengan sejarahnya mengawal demonstrasi besar-besaran kala krisis moneter pada tahun 1998, beliau memimpin Kopassus yang sekaligus memimpin Tim Mawar, satuan pasukan khusus mereka.

Nama Tim Mawar pasti tidak asing di kalangan mahasiswa, setidaknya bagi mereka yang menolak lupa sekaligus meneruskan perjuangan para pendahulu mereka. Pada saat itu, Tim Mawar berhasil "mengamankan" beberapa massa aksi yang sebagian besar dari mereka adalah aktivis dan mahasiswa. Total dua puluh tiga aktivis yang mereka tangkap, sembilan di antara dikembalikan dalam keadaan hidup, sisanya tidak ada kabar hingga saat ini. Akibat dari tindakan Prabowo tersebut, ia dijatuhi sanksi administrasi berupa pemberhentian dari dinas kemiliteran, dapat dibaca dalam surat rekomendasi nomor KEP/03/VIII/1998/DKP.

Peristiwa tersebut adalah satu dari sekian peristiwa yang Prabowo ikut andil di dalamnya. Banyak pihak menyayangkan "tangan berdarah" itu menjabat posisi tertinggi negeri ini. Perjalanannya menjadi presiden yang menimbulkan kebingungan di masyarakat juga tidak lepas dari siapa yang beliau gandeng untuk menjadi wakilnya. Gibran Rakabuming Raka merupakan anak presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo. Gibran menang setelah mendapatkan golden ticket akibat keluarnya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur ambang batas umur minimal calon wakil presiden.

Putusan ia jadikan kendaraan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Kalimat golden ticket sudah selayaknya ditujukan padanya karena salah satu Hakim Konstitusi yang memutus adalah paman dari Gibran sendiri, yaitu Anwar Usman. Demikianlah bagaimana Indonesia mendapatkan pemimpinnya, begitu miris dan culas.

Tidak berhenti di dua manusia yang memimpin negeri ini, para menteri dan jajaran juga menarik untuk ditelusuri. Kabinet "Merah Putih" terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri, menjadikannya kabinet dengan menteri terbanyak dalam sejarah.

Selain itu, terdapat beberapa menteri yang tidak sesuai dengan latar belakangnya, entah pendidikan maupun karir. Sehingga, sangat tampak bahwa isi kabinet "Merah Putih" ini hanyalah bagi-bagi jatah untuk sesiapa pihak yang mendukungnya selama perjalanan Prabowo-Gibran saat pencalonan. Apalagi jika melihat latar belakang Prabowo sebagai anggota militer, terdapat beberapa prajurit militer aktif yang menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

Di antaranya adalah, Letkol Inf Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet), Mayjen TNI Maryono (Inspektur Jenderal Kemenhub), Mayjen TNI Irham Waroihan (Irjen Kementerian Pertanian), Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya (Dirut Perum Bulog), Laksamana Pertama TNI Ian Heriyawan (Badan Penyelenggara Haji), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (Komut PT PINDAD), Laksamana TNI Muhammad Ali (Komut PT PAL Indonesia). Adanya prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil, sempat menjadi isu yang meledak ketika munculnya rencana DPR untuk merevisi UU TNI pada Maret 2025.

Penulis: Ilham B. Raharja



Sumber: bandungbergerak.id

Represi Terhadap Jurnalis Meningkat, Negara dalam Uji Demokrasi

Kasus kekerasan terhadap wartawan terus berulang. Dari penghapusan paksa data, peretasan, hingga pemukulan di lapangan. Negara dianggap gagal melindungi kebebasan pers.

Pukul tiga sore di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, ratusan massa aksi menolak RUU TNI mulai membubarkan diri. Beberapa mahasiswa masih bertahan, dikelilingi barikade aparat yang bersiaga penuh. Di tengah situasi yang memanas itu, Bayu Saputra, jurnalis foto sebuah media daring lokal, mengarahkan lensa ke arah dorong-dorongan antara polisi dan demonstran.

Tak lama setelah memotret, beberapa pria berbaju preman menghampirinya. Mereka meminta Bayu menghapus gambar yang baru saja ia ambil. Ketika Bayu menolak, ia diseret ke pinggir dan diancam. “Kalau tidak mau kerja sama, kamu ikut kami,” kata salah satu pria itu, yang belakangan diketahui anggota aparat berpakaian sipil.

Bayu akhirnya terpaksa menghapus foto-foto dari kameranya. “Saya tidak punya pilihan lain,” ujarnya. Ia bukan satu-satunya. Di Malang, jurnalis kampus juga mendapat intimidasi serupa. Mereka dipaksa menghapus dokumentasi aksi dan diusir dari lokasi.

Pola Lama yang Tak Pernah Selesai

Kekerasan terhadap jurnalis bukan cerita baru. Sejak awal tahun 2024, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat 73 kasus kekerasan terhadap wartawan, termasuk satu kematian saat peliputan. Bentuknya mulai dari kekerasan fisik, intimidasi, pembatasan peliputan, hingga serangan digital dan peretasan.

Aparat negara disebut sebagai pelaku utama dalam sebagian besar kasus tersebut. Dari 89 kekerasan terhadap jurnalis pada 2023, 36 dilakukan oleh aparat keamanan, sementara lainnya berasal dari ormas, individu tak dikenal, atau tidak teridentifikasi.

“Kekerasan terhadap jurnalis seperti menjadi ritual tahunan,” kata Sonya Andomo, Ketua AJI Jakarta. “Selalu ada korban, tapi jarang ada keadilan.” Menurut AJI, hanya dua kasus yang sempat diproses hingga pengadilan dalam lima tahun terakhir. Sisanya menguap tanpa penyelesaian.

Serangan Digital dan Seksual: Ancaman Lain yang Mengintai

Selain kekerasan di lapangan, wartawan juga menghadapi serangan digital yang sistematis. Akun media sosial mereka diretas, data disadap, dan konten liputan dihapus secara paksa. Bahkan, jurnalis perempuan mengalami tekanan lebih berat.

Survei AJI dan PR2Media tahun 2022 menemukan bahwa 82,6 persen jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan seksual, baik secara langsung maupun melalui dunia maya. Sayangnya, banyak yang memilih diam karena tidak ada perlindungan yang memadai. “Dari pelecehan verbal sampai doxing, semua pernah saya alami,” kata seorang jurnalis perempuan yang minta identitasnya disamarkan. “Lapornya ke mana? Perlindungan hampir tak ada.”

Jawa Timur: Daerah Paling Rawan

Menurut catatan SAFEnet, Jawa Timur adalah provinsi dengan jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis tertinggi dalam lima tahun terakhir: 93 kasus, disusul Sumatera Utara (67 kasus), dan Jawa Barat (59 kasus). Kasus di Surabaya dan Malang hanya menambah daftar panjang represi terhadap pers di wilayah ini. Ketua AMSI Jawa Timur, Yatimul Ainun, menyebut tindakan aparat sebagai bentuk pembungkaman. “Ini bukan sekadar pelanggaran undang-undang, tapi bentuk nyata pelemahan demokrasi,” katanya.

Ia mendesak pemerintah dan penegak hukum bertindak tegas.

Demokrasi yang Menciut

Laporan investigatif Tempo dan AJI menyebut ruang kebebasan sipil di Indonesia semakin menyempit sejak periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembatasan kebebasan berekspresi, kriminalisasi aktivis, serta tekanan terhadap media menjadi bagian dari lanskap politik yang represif.

“Yang terjadi bukan insiden, tapi pola,” kata Fatia Maulidiyanti, aktivis HAM dari Lokataru. “Kalau wartawan saja bisa dipukuli, bagaimana dengan warga biasa?”

Ketua AJI Indonesia, Nani Afrida, menambahkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis bukan hanya serangan terhadap individu. “Ini soal hak publik untuk tahu, soal kontrol terhadap kekuasaan.”

Apa yang Bisa Dilakukan Negara?

Berbagai organisasi pers dan masyarakat sipil mendorong pemerintah mengambil langkah serius:

- Bentuk mekanisme perlindungan nasional jurnalis, melibatkan Dewan Pers, kepolisian, dan lembaga independen.
- Hukum semua pelaku kekerasan, termasuk dari kalangan aparat, dengan transparansi penuh.
- Revisi pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE, UU PDP, dan KUHP yang kerap digunakan untuk menjerat wartawan.
- Latih aparat keamanan soal hak asasi dan kebebasan pers, agar tak lagi melihat jurnalis sebagai ancaman.
- Sediakan perlindungan khusus bagi jurnalis perempuan dan mahasiswa, kelompok yang paling rentan diserang.



Pers Bukan Musuh Negara

Kekerasan terhadap jurnalis adalah indikasi kegagalan negara dalam menjamin kebebasan berekspresi. Di negara demokratis, pers adalah mitra untuk mengawasi kekuasaan, bukan musuh yang harus dilumpuhkan.

Jika tindakan represif dibiarkan, bukan hanya kebebasan pers yang hilang—tapi juga kepercayaan publik terhadap negara. Demokrasi bukan hanya tentang pemilu lima tahunan, tapi tentang ruang kritik yang sehat, hak warga untuk tahu, dan pers yang bebas dari intimidasi.

“Jurnalis hanya ingin menjalankan tugas,” kata Bayu Saputra. “Kalau kami dibungkam, siapa lagi yang akan bicara?”

Wartawan dan Pers Mahasiswa Menjadi Korban Kekerasan Aparat dalam Aksi Tolak UU TNI di Malang

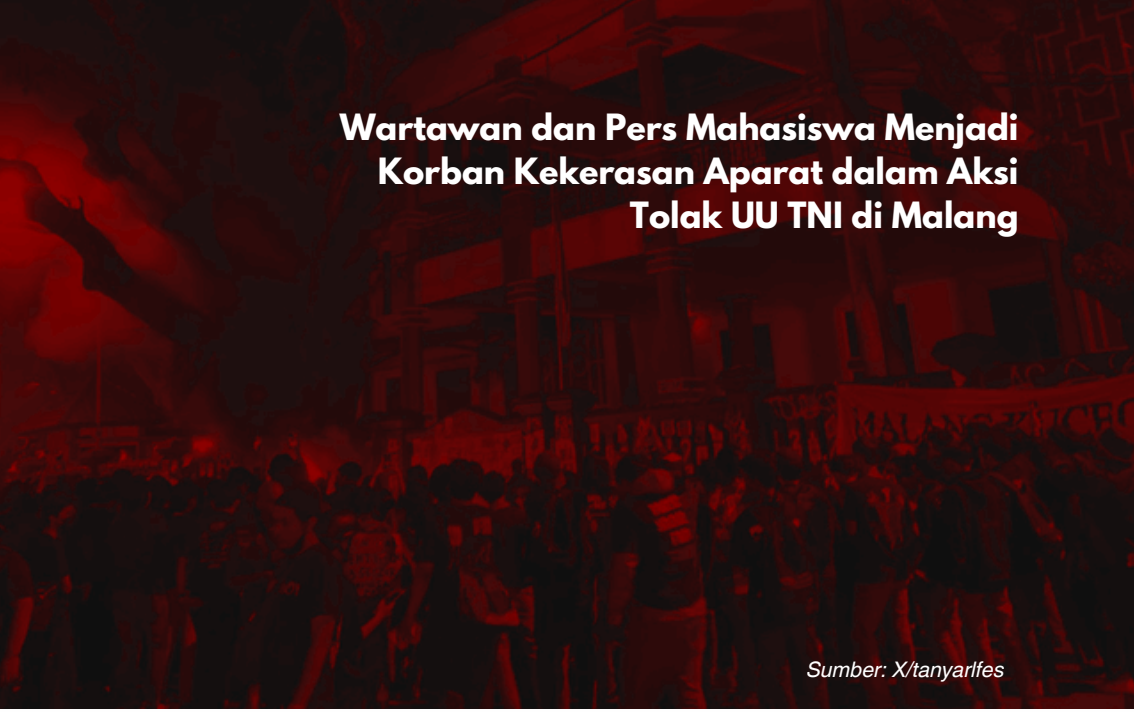

Sumber: X/tanyarlfes

Malang – Demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang TNI (UU TNI) yang berlangsung di depan Gedung DPRD Kota Malang pada Minggu malam, 23 Maret 2025, berubah tragis ketika aparat keamanan mengeksekusi pembubaran paksa sehingga sejumlah wartawan — khususnya pers mahasiswa — menjadi korban kekerasan serius. Insiden ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran soal perlindungan jurnalis, tetapi juga menjadi lampu merah terhadap praktik penanganan demonstrasi oleh aparat di kota-kota demokratis .

Kronologi dan Bentuk Kekerasan

Aksi dimulai sekitar pukul 15.45 WIB dengan mimbar orasi terbuka dari massa aksi di depan DPRD Kota Malang. Namun suasana memanas ketika aparat diterjunkan dan mulai membubarkan massa menggunakan water cannon dan tindakan represif lainnya. Dalam proses pembubaran, setidaknya delapan jurnalis mahasiswa yang berasal dari beberapa lembaga pers kampus seperti LPM Kavling10 (UB), Pers Mahasiswa Perspektif dan UAPM Inovasi UIN Maliki dilaporkan mengalami pemukulan, penyanderaan, perampasan ponsel, bahkan kekerasan fisik berupa diseret dan diinjak–meski telah menunjukkan kartu pers. Salah satu korban, berinisial DN, dianiaya meski telah identitas persnya jelas terlihat.

Tidak hanya itu, tim medis yang ditempatkan secara independen (paramedis jalanan) juga menjadi sasaran. Dilaporkan adanya intimidasi, perampasan alat kesehatan, ancaman pembunuhan hingga pelecehan verbal terhadap relawan medis perempuan dari Ceng Oren dan Kolektif Paramedis Jalanan.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang mencatat total 18 jurnalis dan pers mahasiswa menjadi korban kekerasan dalam aksi tersebut, mencakup jurnalis profesional dan kampus. 2299-0Dari empat organisasi profesi jurnalis di Malang Raya—PWI, AJI, IJTI, dan PFI—semua menyuarakan kecaman keras atas perlakuan aparat terhadap insan pers. Seorang jurnalis dari Media Berita Jatim, Rama Indra, bahkan melapor ke Polda Jatim atas dugaan pengeroyokan oleh aparat saat meliput di Surabaya malam sebelumnya. Ia mengalami luka-luka di pelipis dan bibir akibat tindakan kekerasan oleh total empat hingga lima orang yang diduga anggota kepolisian.

Empat organisasi profesi jurnalistik (AJI, PWI, IJTI, PFI) melalui rilis bersama menyatakan bahwa tindakan aparat sudah melampaui batas kepatutan. Mereka menekankan bahwa kekerasan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran terhadap UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta hak asasi manusia. Sementara Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya—meliputi LBH Pos Malang, PPMI Kota Malang, dan beberapa organisasi mahasiswa—dalam konferensi pers daring meneguhkan bahwa kekerasan yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran serius: menyasar massa demonstran, jurnalis, tim medis, penegakan hukum (tim hukum) bahkan sampai pelecehan seksual verbal dan fisik.

Tuntutan dan Pernyataan Sikap
Organisasi profesi jurnalistik dan koalisi masyarakat sipil bersama-sama mengemukakan tuntutan berikut:

- Pengusutan tuntas dan penindakan pelaku kekerasan oleh aparat keamanan.
- Penghentian segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis, demonstran, dan tim medis.
- Perlindungan penuh kebebasan pers berdasarkan UU Nomor 40/1999.
- Penolakan terhadap UU TNI karena dianggap melemahkan supremasi sipil dan mempersempit ruang demokrasi.
- Menuntut instansi keamanan bertanggung jawab atas kerusakan materi, tindakan represi, dan pelanggaran HAM yang terjadi.

Pernyataan resmi ini ditegaskan oleh ketua lembaga masing-masing (PWI, AJI, IJTI, PFI) dan disampaikan secara publik pada tanggal 25–26 Maret 2025.

Analisis Konteks: Revisi UU TNI dan Suasana Demokrasi Indonesia
Revisi UU TNI mendapat penolakan luas sebab diklaim memperkuat peran militer dalam ranah sipil, meningkatkan jumlah posisi sipil di TNI, dan memperluas tugas TNI termasuk dalam operasi siber dan perlindungan warga di luar negeri . Gelombang protes yang dipimpin BEM SI secara nasional menunjukkan keresahan besar terhadap potensi kembalinya dwifungsi TNI—militer-politik di era reformasi.

Kota Malang menjadi salah satu pusat penyulutan gelombang demonstrasi setelah Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Dalam demo 23 Maret, tercatat sedikitnya 7 personel polisi/TNI terluka, massa melempar Molotov, dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebagian demonstran mengalami luka, dan tim medis tak luput dari serangan aparat.



Sumber: traveloka.com

Dampak Jangka Panjang dan Implikasi
Insiden di Malang ini mengandung berbagai implikasi serius:

- Kebebasan Pers Terancam: Jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol justru menjadi sasaran aparat, memperlemah kepercayaan publik terhadap profesionalitas institusi pengaman negara.
- Pelanggaran HAM dan Norma Demokrasi: Penyiksaan terhadap pendemo dan jurnalis menunjukkan kegagalan aparat menerapkan prinsip demokrasi tak hanya fisik tapi juga hak kebebasan berekspresi.
- Melemahkan Supremasi Sipil: Revisi UU TNI dan kekerasan yang terjadi seakan menjadi paket komplit pelemahan peran sipil dalam sistem kenegaraan.

Kekerasan terhadap jurnalis dan tim medis di Malang bukan hanya kasus isolatif. Ia mencerminkan tenggelamnya prinsip pelindung HAM dalam demokrasi, terutama saat ruang berekspresi dan kebebasan pers mulai diserang dari struktur pengamanan negara. Apalagi terjadi di wilayah provinsi di mana aturan pengamanan aksi demonstrasi sudah jelas diatur (lihat Perkap Nomor 8 Tahun 2010).

Aliansi jurnalistik dan masyarakat sipil menuntut solusi jangka panjang: pengusutan transparan, evaluasi prosedur pengamanan, dan peninjauan kembali poin-poin dalam UU TNI yang dianggap mengancam demokrasi.

Seiring reformasi berlanjut, prinsip negara demokrasi seharusnya dibuat sebagai pelindung kebebasan, bukan sebagai instrumen represi. Kasus di Malang semoga menjadi peringatan untuk memperbaiki tata kelola aksi publik, dan memastikan bahwa TNI maupun Polri bertugas sebagai penjaga rakyat, bukan sebagai ancaman bagi mereka yang menyampaikan kritik atau meliput.

Pengelolaan Anggaran Negara Sepanjang Tahun 2020

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki keragaman pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan pusat dan daerah, tersebar dari sabang sampai dengan merauke. Keragaman tersebut yang ditanda oleh setiap daerah yang dipimpin oleh kepala-kepala daerah yang dipilih oleh rakyat di pemilukada, serta berakhir pada terpimpinnya daerah dijalankan oleh kepala daerah tersebut, menandakan adanya kepercayaan publik untuk dipimpin oleh kepala daerah yang sudah terpilih. Akan tetapi daerah yang sudah dikelola oleh kepala daerah terpilih tersebut, berhak mengelola daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta daerah yang dikelola tersebut ditandai dengan adanya anggaran daerah yang dberikan oleh pusat, yang dimana untuk keperluan daerah, anggaran tersebut dipergunakan untuk rakyat.

Anggaran tersebut dapat berupa anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, serta anggaran lainnya. Anggaran tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Karena rakyat merupakan penggerak roda perekonomian baik dipusat maupun di daerah. Sehingga untuk menyeimbangkan perekonomian, maka pemerintah pusat maupun daerah berhak memberikan bantuan kepada rakyat yang memiliki keterbatasan sarana untuk mengembangkan dirinya untuk di bidang usaha, dalam hal ini anggaran tersebut, meliputi anggaran di bidang perekonomian (Bantuan Langsung Tunai Bidang Usaha) yang tujuannya untuk membantu rakyat.

Dalam pengelolaannya, diperlukan hukum responsif berdasarkan kebutuhan sosial (Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi, Philippe Nonet & Philip Selznick, sebuah Pengantar: Satjipto Rahardjo, hal 59) untuk mengelola keuangan negara di daerah. Kemudian diperlukan peraturan yang lebih diarahkan ke pengawasan serta pengelolaan bantuan-bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Sehingga peraturan tersebut lebih efektif untuk merespon keinginan masyarakat.

Peraturan tersebut kemudian dikerucutkan sebagai bentuk efektifitas bagi pengelolaan keuangan negara di daerah yang bertujuan untuk meminimalisir kejahatan korupsi. Contohnya pada pengelolaan keuangan negara di daerah dalam penyaluran bantuan langsung tunai dari berbagai bidang (pendidikan, kesehatan, pariwisata, perekonomian) diperlukan peraturan presiden untuk seyogyanya dapat mendukung gerakan anti korupsi di Indonesia.

Peraturan presiden tersebut bersifat mengatur terkait dengan pengelolaan keuangan negara di daerah. Demi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran tersebut, maka presiden perlu membentuk keputusan presiden untuk membentuk tim khusus pengawasan. Kemudian presiden dapat memberikan peringatan tegas kepada kepala daerah yang tidak melakukan pengelolaan anggaran dengan baik. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari hasil pengelolaan anggaran negara baik dipusat maupun di daerah.

Meninjau Tim Khusus tersebut presiden dapat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, hingga Kejaksaan, untuk ikut memberikan dukungan gerakan anti korupsi. Tim khusus ini nantinya akan melaporkan secara langsung kepada presiden terkait dengan penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat.

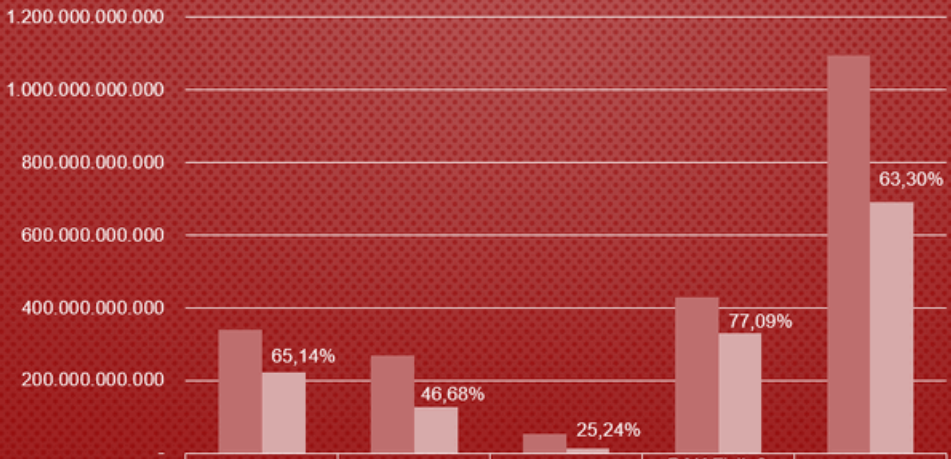

	Bel. Peg	Bel. Barang	Bel. Modal	DAK Fisik & Dana Desa	Total
Pagu	341.208.529.0	270.693.144.0	53.622.042.00	428.553.130.0	1.094.076.845
Realisasi	222.273.045.0	126.370.483.5	13.534.819.59	330.370.758.9	692.549.107.1

dalam ribuan rupiah

Sumber: djpb.kemenkeu.go.id

Evaluasi gerakan pemberantasan korupsi sepanjang Tahun 2020 perlu dilakukan oleh para wakil masyarakat seperti akademisi sebagai tim penilai suatu pengelolaan anggaran negara di daerah. Kelompok ini nantinya akan menjadi tim penilai yang diberi tugas oleh pemerintah dengan cara melihat kondisi di lapangan maupun secara sistem, pengawasan dan peninjau pengelolaan anggaran, pengawasan dan peninjau pengelolaan anggaran.

Penulis : Raditya Feda Rifandhana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Menimbang Ulang Efisiensi Anggaran demi Kesejahteraan Bersama

Pemotongan anggaran negara yang diterapkan demi efisiensi keuangan berpotensi menggerus sektor-sektor vital seperti pendidikan, daya beli masyarakat, dan kesejahteraan pekerja publik. Jika tidak dikelola dengan cermat, kebijakan ini dapat menjadi bumerang bagi stabilitas sosial dan ekonomi.

Kekhawatiran muncul dari berbagai lapisan masyarakat. Sebagai mahasiswa, kami merasa langsung terdampak. Pemangkasan anggaran pendidikan berisiko menurunkan kualitas fasilitas belajar, menghambat riset, dan membatasi akses terhadap beasiswa yang sangat dibutuhkan. Kampus negeri dan lembaga pendidikan lainnya bisa kehilangan daya saing, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menjadi fondasi masa depan bangsa. Ketika anggaran pendidikan dikorbankan, yang tergadaikan bukan sekadar ruang kelas, melainkan harapan dan potensi generasi muda.

Dari sisi masyarakat umum, tekanan juga mulai terasa. Kebijakan pemotongan belanja negara berdampak langsung pada penghapusan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pegawai negeri, serta pemutusan hubungan kerja bagi tenaga honorer. Ini bukan sekadar isu internal pemerintahan efek dominonya menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Daya beli menurun, harga barang meningkat, dan kehidupan sehari-hari menjadi semakin sulit. Rakyat tidak menolak penghematan, tetapi pemerintah harus memilah prioritas dengan bijak agar efisiensi tidak berubah menjadi beban ekonomi.

Sementara itu, dari sudut pandang pekerja di sektor pemerintahan, keresahan semakin nyata. Pemangkasan fasilitas, pembatasan aktivitas kantor, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga honorer menimbulkan ketidakpastian yang mengganggu produktivitas dan moral kerja. Belanja negara bukan sekadar deretan angka dalam laporan keuangan; di baliknya terdapat jutaan pekerja yang menggantungkan hidup pada keberlanjutan program-program pemerintah. Efisiensi seharusnya dilakukan dengan pendekatan strategis dan bertanggung jawab, bukan melalui pemangkasan sepihak yang meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemerintah memang dituntut untuk menjaga stabilitas fiskal, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, stabilitas jangka pendek tidak boleh dicapai dengan mengorbankan aspek-aspek mendasar yang menopang masa depan bangsa. Pendidikan, kesejahteraan sosial, dan keberlangsungan kerja adalah tiga pilar utama yang harus dijaga dalam kondisi apa pun.

Sudah saatnya kebijakan efisiensi dilakukan secara cermat, transparan, dan partisipatif, melibatkan suara dari mereka yang terdampak secara langsung. Rakyat bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga mitra dalam menjaga keberlanjutan negara. Jika pemerintah mampu menyeimbangkan efisiensi dengan perlindungan sektor strategis, penghematan dapat menjadi langkah maju, bukan ancaman sosial.

Features

Budaya - Jelajah - Pendidikan - Religi





Menjaga Identitas Bangsa di Tengah Gempuran Modernisasi: Suara Anak Muda KOMSEN

Di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, suara-suara muda yang peduli terhadap pelestarian budaya tradisional terus menyala. Hal ini tergambar jelas dari percakapan kami bersama dua sosok inspiratif dari Unit Kegiatan Mahasiswa Seni (KOMSEN), yaitu Ajeng Ayu Sisi Wulandari dari divisi tari modern dan Florensa Putri, CEO tari tradisional KOMSEN. Keduanya membawa perspektif berbeda namun satu tujuan: menjaga keberlangsungan budaya lokal.

Budaya Lokal, Ekspresi Suara Hati dan Identitas

Bagi Ajeng, budaya lokal adalah suara hati yang diekspresikan dalam bentuk seni. Ia menyampaikan bahwa setiap gerakan tari tradisional bukan hanya simbol, melainkan pancaran emosi dan cerita dari masyarakat yang melahirkannya. "Misalnya tari yang melenggak-lenggok, itu menggambarkan seseorang yang sedang jatuh cinta. Tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang lahir dari suara hati masyarakat daerah tersebut," ujarnya.

Senada dengan Ajeng, Florensa memaknai budaya lokal sebagai warisan turun-temurun yang mencerminkan karakteristik unik masing-masing komunitas. “Setiap masyarakat punya gayanya sendiri. Misalnya masyarakat Dayak dengan busana khasnya, atau Jawa dengan kebaya dan kemben,” kata Florensa. Ia menekankan bahwa budaya adalah identitas—tanpa itu, masyarakat kehilangan ciri khasnya.

Tantangan Menjaga Budaya di Era Modern

Meski pemahaman terhadap budaya tetap hidup, tantangan utama justru datang dari perubahan zaman. Ajeng berpendapat bahwa menjaga budaya jauh lebih sulit daripada mengembangkannya. “Kalau mengembangkan, kita bisa tarik orang luar, bikin event. Tapi menjaga—itu yang sulit. Banyak orang bahkan tidak tahu apa itu Tari Remo,” jelasnya.

Sementara Florensa menyoroti tantangan dari sisi ketertarikan generasi muda. Menurutnya, budaya tradisional kalah populer dibanding tren modern seperti K-pop atau streetwear. “Sekarang orang mikir tari tradisional itu kuno, ketinggalan zaman. Padahal itu warisan kita,” katanya dengan nada prihatin.

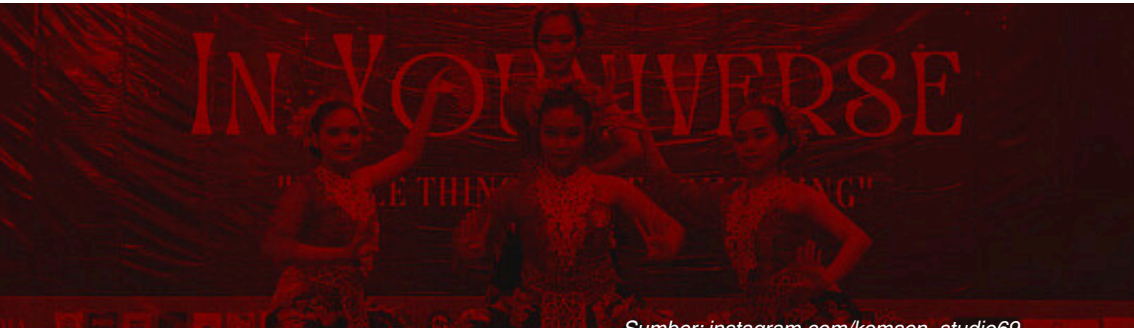

Sumber: instagram.com/komsen_studio69

Salah satu strategi yang dilakukan KOMSEN adalah dengan membuat tarian kontemporer —gabungan antara unsur modern dan tradisional—agar tetap relevan dengan selera muda. Meski begitu, menurut Florensa, minat anggota kerap naik-turun. “Habis diklat, banyak yang menghilang. Yang penting sertifikat,” tambahnya.

Tradisional vs Modern: Sama-Sama Penting, Tapi Beda Arah

Menarik ketika membandingkan antara tari tradisional dan tari modern sebagai bentuk ekspresi budaya. Ajeng menilai bahwa tari modern lebih bersifat personal dan emosional. “Kalau tari modern itu ekspresi emosi kita sendiri. Tapi kalau budaya tradisional, itu hatinya masyarakat. Maknanya lebih dalam,” ungkapnya.

Florensa menambahkan bahwa perbedaan bukan hanya pada makna, tetapi juga pada estetika. “Tari tradisional itu lebih lemah gemulai, mencerminkan kelembutan. Tapi modern lebih enerjik dan terbuka,” katanya. Ia menyinggung soal kostum yang juga mencolok perbedaan: dari kebaya dan kain panjang dalam tarian tradisional hingga crop top dan celana pendek dalam modern dance.

Fashion dan Budaya: Apakah Tren Menyisihkan Warisan?

Pertanyaan tentang apakah tren fashion saat ini telah melupakan budaya mendapat jawaban yang cukup seragam. Menurut Ajeng, tren fashion saat ini tidak sepenuhnya melupakan budaya, namun lebih banyak dipengaruhi oleh fenomena FOMO (Fear of Missing Out).

“Anak sekarang ikut tren luar negeri seperti skena streetwear. Tapi kadang justru di luar negeri ada yang pakai kebaya, sementara di sini kita lupa,” jelasnya.

Florensa mengungkapkan kekhawatiran yang sama. Ia menyayangkan bahwa banyak orang tua yang melihat fashion modern sebagai tidak sopan, sementara generasi muda merasa itu hal biasa. “Jadi ada gap generasi. Padahal sebenarnya bisa kok dikombinasikan asal tidak melupakan akar budaya,” tambahnya.

Melestarikan Lewat Komunitas dan Inovasi Digital

Kedua narasumber sepakat bahwa melestarikan budaya harus dilakukan secara aktif, salah satunya melalui komunitas. Ajeng mencontohkan di kampung halamannya, kegiatan seperti Reog Ponorogo masih rutin digelar setiap bulan. “Itu bukan cuma hiburan, tapi cara nyata menjaga budaya. Gamelan, kostum, semua orisinal. Bukan pakai sound besar atau sekedar pertunjukan,” katanya

Ia juga mengusulkan pemanfaatan media sosial seperti TikTok untuk mengenalkan budaya lokal dalam format yang mudah dicerna oleh generasi Z. “Kita bisa buat konten tentang budaya, tapi pakai bahasa Inggris supaya lebih universal,” jelasnya.

Florensa menambahkan bahwa peran event sangat penting. “Kalau ada yang mulai ajak, ayo kita gelar event, pasti jalan. Tapi kalau enggak ada yang mulai, ya bubar,” katanya. Ia berharap generasi muda bisa lebih proaktif menginisiasi acara budaya di kampus dan lingkungan sekitarnya.

Pesan untuk Generasi Z: Jangan Sampai Budaya Kita Hilang

Dalam penutupnya, Ajeng memberikan pesan yang menyentuh: “Saya suka K-pop, dance modern, tapi saya juga masih ikut komunitas tari tradisional seperti Tari Pendet dari Bali dan Tari Remo. Karena kalau kita tidak jaga, budaya kita bisa diambil negara lain. Mereka sudah belajar, tinggal ambil, dan kita tinggal kehilangan.”

Florensa juga menitipkan harapan kepada generasi muda agar tetap bangga pada akar budayanya. “Kalau budaya kita sendiri hilang, kita nggak punya karakter. Jadi meskipun minat ke modern dance, jangan tinggalkan tradisional. Mereka bisa jalan bareng.”

Penulis: Maharani Aisya



Sumber: instagram.com/komsen_studio69

Ketika Puncak Tak Lagi Tentang Pendakian: Imapala, Generasi Baru, dan Tantangan Pendaki FOMO



Sumber: instagram.com/imapala.unmer

Di balik gagahnya deretan gunung yang membelah cakrawala nusantara, tersimpan kisah-kisah sunyi yang tak pernah sampai ke layar ponselmu. Di tengah derasnya arus tren naik gunung yang kian menjamur di media sosial, ada suara lirih yang mengingatkan: tidak semua orang yang naik gunung, tahu untuk apa mereka naik. Bagi Rian, Ketua IMAPALA Fakultas Teknologi Informasi, pernyataan itu lebih dari sekadar kritik — ia adalah kenyataan yang harus dihadapi saban tahun.

Berlokasi di kampus yang hiruk pikuk dengan jadwal kuliah dan praktikum, organisasi Imapala berdiri sebagai ruang yang menawarkan kebebasan dalam bentuk paling purba: menjelajah. Bagi Rian, menjelajah bukan sekadar berjalan menanjak dan menjejak tanah di ketinggian. Ia adalah bentuk pencarian — terhadap tempat, budaya, dan pada akhirnya, diri sendiri.

“Kalau menurut saya, menjelajah itu bukan cuma soal naik gunung, di Imapala, kami memaknainya sebagai upaya mendatangi suatu tempat, mengeksplorasi, dan mungkin berkontribusi di wilayah tersebut. Itu bisa wilayah fisik, bisa juga pengalaman dan budaya.”

Rian tak asal bicara. Ia adalah bagian dari generasi penerus organisasi yang berdiri sejak 1984. Bersama rekan-rekannya, ia telah ikut serta dalam berbagai ekspedisi ke daerah-daerah terpencil — salah satunya ke Kalimantan, tempat mereka bertemu suku pedalaman dan menggali kekayaan budaya yang tak terjamah. “Kami menyusun laporan, dokumentasi, semua kami abadikan. Bukan sekadar perjalanan, tapi riset, pengabdian.” Namun, Rian menyadari, semangat semacam itu kini tidak lagi menjadi mayoritas.

“Dalam beberapa tahun terakhir, Imapala menghadapi perubahan karakter generasi yang ikut bergabung. Mereka datang dengan semangat membara, namun bukan karena ingin belajar, melainkan karena takut tertinggal — atau dalam istilah populernya, FOMO (Fear of Missing Out).

Kami lihat pola yang muncul. Banyak yang daftar karena tren. Mereka ingin naik gunung, posting foto, merasa keren. Tapi ketika masuk ke tahap diklat, mulai terasa berat,” ungkapnya. Data yang ia sebut mencengangkan: dari 31 pendaftar kegiatan diklatsar tahun 2023–2024, hanya 6 yang bertahan hingga akhir. Perubahan ini tidak lepas dari perbedaan generasi. Menurut Rian, generasi sebelumnya — terutama yang aktif di Imapala era 80-an hingga awal 2000-an — cenderung lebih disiplin, berani mengambil risiko, dan tahan banting. Sementara generasi sekarang, meski punya semangat tinggi, sering kali kurang siap secara mental dan fisik.

Ia mencontohkan bagaimana banyak peserta terlalu menggampangkan tahapan pra-kegiatan. "Persiapan fisik cuma seminggu, latihan cuma setengah jam, lalu langsung naik gunung dengan ketinggian 3000 meter. Saat kegiatan, mereka kaget. Capek, cedera, dan mental jatuh.” Masalahnya bukan hanya di stamina. Banyak juga yang tak memahami materi dasar seperti manajemen perjalanan, logistik, bahkan penanganan darurat saat terjadi hipotermia atau tersesat. “Kami pernah dengar kasus di mana satu kelompok pendaki ninggalin temannya yang sakit di bawah dan tetap naik ke puncak. Itu bukan hanya kelalaian, tapi juga kegagalan dalam memahami arti kebersamaan,” katanya tegas

Bagi Imapala, kebersamaan dan soliditas bukanlah atribut tambahan, tapi fondasi. Organisasi ini mendidik anggotanya untuk tangguh secara teknis dan emosional. Tahapan kegiatan pun dibagi dengan jelas: pra (persiapan), massa (kegiatan lapangan), dan pasca (evaluasi). Di tahapan pra, misalnya, anggota didorong untuk riset lokasi, memahami karakteristik gunung, dan menyusun rencana logistik.

“Kalau mau naik gunung 2000 meter, mungkin latihan satu bulan cukup. Tapi kalau 3000 ke atas? Dua sampai tiga bulan harus intens. Bahkan ada yang latihannya setahun penuh untuk Cartenz Pyramid di Papua,” terang Rian. Ia mengingatkan, ada pula pendaki yang sudah menyiapkan segalanya selama setahun, tapi tetap batal naik karena cuaca ekstrem. “Itu keputusan yang tepat. Karena dalam pendakian, keselamatan adalah prioritas, bukan ego.”.

Dalam konteks pendidikan dan regenerasi, Imapala kini memfokuskan diri pada upaya edukasi. Mereka tidak melarang siapa pun untuk mencintai alam. Namun, cinta itu harus dibarengi pemahaman. “Naik gunung bukan soal gaya hidup, tapi soal tanggung jawab. Kita harus tahu bahaya, tahu cara bertahan hidup, tahu kapan harus minta tolong.”

Organisasi ini secara aktif memberikan pembekalan tentang survival, manajemen waktu, penggunaan perlengkapan, hingga navigasi darurat. Bahkan aspek keuangan dan logistik pun menjadi bagian dari materi yang harus dipahami calon anggota. Semua ini dilakukan demi memastikan bahwa siapa pun yang terjun ke alam bebas, melakukannya dengan bekal yang cukup

Rian menyampaikan pesannya untuk mahasiswa yang ingin mulai menjelajah alam. “Kalau memang niatnya naik gunung, ya silakan. Tapi pelajari dulu karakteristik gunungnya. Latih fisikmu, pelajari materinya. Jangan sampai kita naik gunung cuma demi eksistensi, tapi pulangnya tinggal cerita buruk — atau lebih buruk lagi, nggak pulang sama sekali.”

Di tengah gemuruh dunia yang semakin terhubung secara digital, suara-suara seperti Rian mungkin terdengar pelan. Namun justru dari ketenangan itu, ada kebijaksanaan yang tak bisa dicari lewat algoritma. Karena alam, seperti halnya hidup, tidak bisa ditaklukkan dengan niat setengah-setengah. Ia menuntut kesiapan, kerendahan hati, dan pemahaman — bukan sekadar pencitraan. Dan di balik setiap langkah menuju puncak, ada satu pertanyaan yang harus dijawab setiap pendaki: “Apa yang sebenarnya kau cari di atas sana?”

Penulis: Maharani Aisya

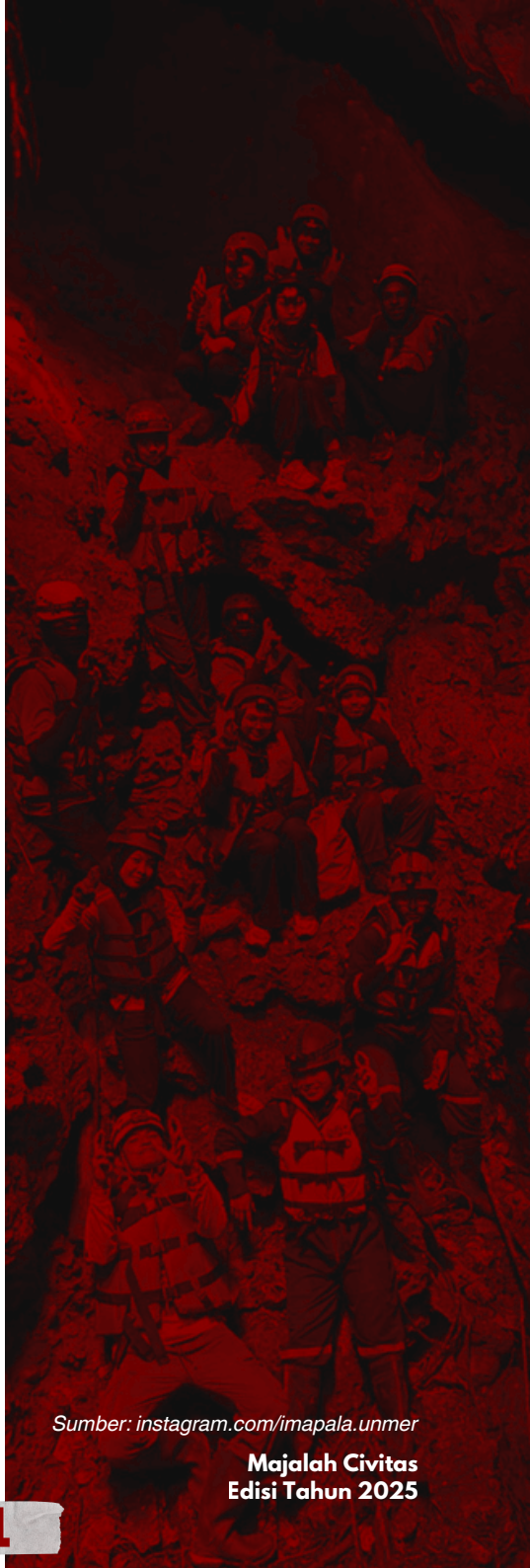

Sumber: instagram.com/imapala.unmer

Efisiensi Anggaran Era Prabowo: Antara Penghematan dan Ancaman Kualitas Pendidikan



Sumber: unmer.ac.id

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi besar-besaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini dilakukan dengan alasan efisiensi belanja negara dan optimalisasi anggaran untuk program-program prioritas. Namun, sektor pendidikan menjadi salah satu yang paling terdampak, menimbulkan polemik dan kekhawatiran dari berbagai kalangan.

Secara total, pemerintah mengklaim telah menghemat anggaran hingga Rp306,7 triliun, terdiri dari Rp256,1 triliun dari kementerian dan Rp50,6 triliun dari pemerintah daerah. Pemangkasan dilakukan terhadap pos-pos anggaran yang dinilai tidak langsung memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti perjalanan dinas, studi banding ke luar negeri, pengadaan kendaraan dinas baru, serta kegiatan seremonial.

Namun, di balik semangat penghematan ini, muncul berbagai persoalan terutama dari sektor pendidikan. Dua kementerian yang bertanggung jawab langsung terhadap pendidikan di Indonesia, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemen Dikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), turut terkena dampak dari kebijakan efisiensi ini.

Dari data yang dihimpun, Kemendikdasmen mengalami pemotongan anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp25,5 triliun, sementara Kemendiktisaintek kehilangan sekitar Rp14–22,5 triliun dari pagu awal sebesar Rp56–57 triliun. Artinya, dua kementerian pendidikan ini mengalami pemotongan total hingga lebih dari Rp30 triliun dalam waktu singkat.

Dampak dari efisiensi ini tidak hanya terasa di tingkat kementerian, tetapi juga hingga ke lembaga pendidikan tinggi dan sekolah-sekolah di daerah.

Program-program unggulan seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilaporkan sudah tidak lagi dilanjutkan. Selain itu, program-program pengembangan kreativitas mahasiswa, beasiswa seperti KIP-K, dan kegiatan riset dosen juga terkena imbas berupa pengurangan bahkan peniadaan anggaran.

Pendidikan Tidak Boleh Menjadi Korban

Wakil Dekan FISIP Universitas Merdeka Malang, Rochmad Effendy, BHSc., M.Si., mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan efisiensi ini. Menurutnya, efisiensi tentu merupakan kebijakan yang baik selama dilakukan dengan bijak. Namun, ia menegaskan bahwa anggaran pendidikan seharusnya menjadi prioritas, bukan sasaran pemangkasan.

“Kalau efisiensi itu hanya memotong rapat-rapat seremonial, pengadaan kendaraan, atau perjalanan dinas, itu bagus. Tapi kalau beasiswa mahasiswa dikurangi, atau UKT naik karena dana bantuan berkurang, itu justru melanggar hak dasar rakyat,” ujarnya.

Menurut beliau, pendidikan adalah hak konstitusional warga negara yang telah dijamin dalam UUD 1945. Oleh karena itu, tidak seharusnya anggaran pendidikan dikurangi atas nama efisiensi. Ia menyoroti bahwa beasiswa seperti KIP-K dan dana BOS adalah penyambung hidup banyak siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Ketika anggaran itu dikurangi, maka kualitas dan akses pendidikan nasional berada dalam ancaman serius.

Selain itu, Rochmad juga menilai bahwa pemangkasan anggaran akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Program seperti MBKM yang memberikan kesempatan mahasiswa belajar di luar kampus sangat penting untuk pengembangan kompetensi mereka. “Kalau sekarang dipotong, bagaimana kita bisa mencetak generasi unggul 2045?” tanyanya retoris.

Pro dan Kontra di Masyarakat

Pemerintah sendiri berdalih bahwa efisiensi dilakukan untuk mendukung program prioritas lainnya, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan menghabiskan anggaran hingga Rp171 triliun per tahun. Program ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian 83 juta siswa dan ibu hamil di seluruh Indonesia, dan diklaim dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 2 persen poin.

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Banyak yang menilai bahwa efisiensi yang menyasar sektor pendidikan dan kesehatan adalah langkah keliru. Prof. Dyah Mutiarin, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menyatakan bahwa sektor pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan air bersih tidak boleh menjadi sasaran pemangkasan anggaran. “Jika efisiensi dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap rakyat kecil, maka yang terjadi justru memperdalam kesenjangan sosial,” ungkapnya.

Gelombang kritik juga datang dari kalangan mahasiswa. Aksi bertajuk #IndonesiaGelap menyeruak di berbagai media sosial dan kampus. Mereka menuntut agar Inpres No. 1/2025 dicabut atau direvisi, karena dinilai membahayakan masa depan pendidikan nasional.

Solusi Berbasis Keberlanjutan

Meski kritis terhadap kebijakan efisiensi, Rochmad Effendy tidak menolak sepenuhnya ide penghematan anggaran. Ia justru mengajak agar efisiensi diterjemahkan dalam konteks keberlanjutan dan kesederhanaan hidup. “Kita bisa mulai dari hal kecil. Kurangi konsumsi kertas, batasi penggunaan energi, kelola sampah kampus menjadi kompos atau bahan daur ulang. Ini bentuk efisiensi yang tidak merugikan siapa pun,” jelasnya.

UNMER Malang, kampus tempat beliau mengajar, telah memulai inisiatif ini melalui ekonomi sirkular di lingkungan kampus. Sampah kantin dikelola menjadi kompos, kertas bekas digunakan ulang, dan mahasiswa diajak menanam secara hidroponik dan vertikal garden di lingkungan sekitar. “Kalau semua institusi pendidikan mulai dari hal-hal kecil ini, kita akan menghemat banyak dan menciptakan kebiasaan baik pada generasi muda,” tambahnya.

Efisiensi yang Keren Adalah yang Pro-Rakyat

Menutup wawancaranya, Rochmad menyatakan bahwa efisiensi akan menjadi langkah keren hanya jika diarahkan pada pengurangan konsumsi yang tidak produktif dan diarahkan langsung untuk kesejahteraan rakyat. “Kalau pejabat kita bisa hidup sederhana, tak perlu kendaraan mewah, makan di tempat yang biasa saja, lalu fokus pada pelayanan publik—barulah kita bisa bicara efisiensi yang sesungguhnya,” tegasnya.

Ia juga menyinggung bagaimana pejabat di negara maju seperti Belanda memilih naik transportasi umum ketimbang mobil dinas. “Kalau Menteri saja bisa naik motor, ngapain iring-iringan empat mobil untuk satu pejabat? Itu yang harus diubah.”

Efisiensi anggaran adalah keniscayaan dalam tata kelola negara modern. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan dengan adil, transparan, dan tidak menyentuh hak dasar warga negara. Pendidikan bukan hanya soal angka dalam APBN, melainkan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas bangsa Indonesia ke depan.

Jika efisiensi dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan tidak mengorbankan pendidikan, maka semangat penghematan ini patut diapresiasi. Tetapi jika sebaliknya, maka yang lahir adalah generasi yang terbatas aksesnya pada ilmu dan kesempatan—sebuah harga mahal yang tidak sebanding dengan angka yang berhasil dihemat.

Penulis: Khotimatul Maulidah



Sumber: malangposcomedia.id



Sumber: hidupkatholik.com

Laudato Si : Luar Biasa, Uskup Agung Ende!

Sebagai daerah mayoritas Katolik dan tempat berdirinya Kerajaan Katolik di Indonesia, pengaruh Gereja sangatlah kuat di Flores. Terutama pengaruh seorang Uskup. Uskup adalah kepala Gereja lokal yang mengepalai para imam (pastor) di wilayah tertentu yang diangkat oleh Paus sebagai kepala Gereja Universal (Katolik) yang berpusat di Roma melalui Papal Nuncio (Utusan Paus) yang bertindak atas nama Paus di negara-negara tertentu, bisa satu negara ataupun lebih tergantung dan disesuaikan dengan kebutuhan jemaat. Pengaruh yang dimiliki ini dapat menjadi baik apabila dimanfaatkan dengan benar untuk mensejahterakan umat baik dari kualitas iman, moral, bahkan kesejahteraannya. Namun ini sangat berbahaya apabila tidak digunakan untuk kepentingan umat, melainkan kepentingan pribadi sang Uskup apalagi jika itu melanggengkan kapitalisme. Meskipun kita meyakini bahwa dia diurapi oleh Allah, toh ia juga seorang manusia yang pastinya memiliki salah dan dosa, bukan? Ya, marilah kita berdoa & jangan ragu untuk mengkritik para Uskup.

Pada Januari yang lalu, Uskup Keuskupan Agung Ende Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD dengan tegas menyatakan menolak proyek strategis nasional yaitu pusat Geothermal pada beberapa wilayah di daerah pelayanannya (Ende, Ngada, dan Nagekeo). Menurut data dari situs web Floresadotco, Uskup Agung Ende telah ditemui Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 15 Maret yang lalu, dan beliau menegaskan tetap pada sikapnya yaitu menolak segala bentuk eksploitasi alam melalui proyek Geothermal seperti yang disampaikannya dalam acara Natal bersama para Imam se-Keuskupan Agung Ende pada 06 Januari lalu.

Penolakan keras Keuskupan Agung Ende terhadap rencana pelaksanaan proyek baru Geothermal mencuat setelah munculnya lubang-lubang yang menyemburkan lumpur dan uap panas disertai suara gemuruh di sekitar proyek geothermal Mataloko (Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada) berdasarkan kajian dan kesaksian-kesaksian masyarakat setempat.

Pembangkit listrik tenaga panas bumi (Geothermal) merupakan salah satu cara untuk menambah pasokan listrik di suatu wilayah. Tentu kita tidak membantah dampak positif adanya proyek Geothermal. Akan tetapi, Geothermal juga memiliki banyak dampak negatif seperti kekeringan lahan dan juga kesalahan pengeboran yang akan menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat, identitas budaya, dan juga tempat tinggal masyarakat. Tidak ada jaminan bahwa setelah proyek Geothermal dilaksanakan, masyarakat akan sejahtera, serta juga tidak ada jaminan siapa yang harus bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan pengeboran dan kekeringan. Karena selama ini banyak sekali korporasi yang melanggar UU PPLH hanya diberikan sanksi administratif saja.

Penolakan ini jelas disambut baik dan didukung oleh banyak elemen masyarakat, seperti masyarakat adat, mahasiswa hingga kaum klerus [tertahbis, baca : imam] karena sudah seharusnya Flores menjadi pulau yang mengutamakan sektor laut, pertanian, peternakan, dan perkebunan. Flores bukan wilayah tambang, apalagi industri besar mengingat ukuran pulaunya yang sangat kecil dan bisa saja tenggelam karena lumpur(?)

Kriminalisasi Aktivis Lingkungan : Bentuk Kebiadaban Reformasi

Nasib berbeda justru terjadi di Kabupaten Manggarai (Gereja : Masuk wilayah Keuskupan Ruteng) Beberapa waktu lalu, pemuda Desa Poco Leok melakukan unjuk rasa untuk menuntut agar Bupati Heribertus L. Nabit agar tidak menandatangani SK izin Geothermal. Namun setelah audiensi yang alot, Heri Nabit tetap bersikeras untuk melanggengkan para kapitalis untuk masuk ke dalam wilayah dan merusak alamnya.

Unjuk rasa yang terjadi bersamaan dengan gagalnya negosiasi dalam audiensi di dalam tersebut kemudian mengakibatkan kerusuhan di depan Kantor Bupati Kab. Manggarai (Ibukota : Ruteng), dan koordinator lapangan aksi justru dikriminalisasi. Padahal, hal tersebut hanyalah ungkapan kekesalan mereka untuk memprotes kebijakan pemerintahnya. Kita tidak membenarkan tindakan anarkis, namun jika tidak begitu apakah kita bebas & lepas dari kebiadaban orde baru dengan Soeharto sebagai boneka imperialis? Meskipun kita sebenarnya tidak akan sepenuhnya bebas dari pengaruh buruk orde baru, apalagi pasca menjabatnya Ketua Tim Mawar & Pemilik akun Fufufafa sebagai ketua guild bangsa ini.

Sikap Tegas Gereja Katolik Roma

Sebagai lembaga agama yang terpusat, hierarkis, dan kanonik, Gereja Katolik Roma secara resmi mengajarkan bagaimana umatnya harus menghargai alam, merawatnya, dan menghormatinya sebagai ciptaan Allah “yang lebih dahulu ada“ daripada manusia. Berdasarkan Kitab Suci, Manusia merupakan ciptaan paling terakhir yang dianggap paling sempurna karena merupakan citra Allah sendiri. Namun, seringkali manusia merasa bahwa mereka adalah “pemilik“ alam semesta sehingga menggunakan sesuka hatinya yang berujung pada eksploitasi berlebihan terhadapnya.

Gereja melalui Paus Fransiskus dalam Ensiklik “Laudato Si“ yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2015 mengajak seluruh umat

Katolik dan seluruh umat manusia untuk menghargai dan menghormati alam. Dalam tahun Yubelium (Jubilee) 2025 ini, Gereja kembali menyerukan “pertobatan ekologis“, dimana umat Katolik tidak hanya dituntut untuk memperbaiki relasi dengan Allah dan Manusia, tetapi juga alam melalui cara-cara sederhana yaitu tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, serta edukasi dan sosialisasi terhadap kaum muda Gerejawi seperti yang sudah penulis ikuti tanggal 15 Maret yang lalu di salah satu Gereja Katolik di Malang, bertepatan dengan hari pernyataan sikap Uskup Agung Ende dihadapan para Kapitalis Birokrat tersebut.

Konsumerisme : Degradasi Moral

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumerisme adalah paham mengenai gaya hidup yang menganggap bahwa kebahagiaan didapat dari memiliki barang-barang mewah. Gaya hidup yang tidak hemat (foya-foya) dewasa ini menjadi semakin marak dan harus melahirkan eksploitasi yang lebih besar lagi. Hal ini mengakibatkan hilangnya sumber daya alam sebagai sumber pangan, sandang, dan papan manusia.

Mengutip ensikliknya, Laudato Si', Paus Fransiskus mengatakan bahwa paradigma konsumerisme “membuat orang percaya bahwa mereka bebas selama mereka telah memiliki kebebasan untuk mengkonsumsi. Tetapi dalam kenyataannya mereka yang benar-benar bebas adalah minoritas yang memegang kekuatan ekonomi dan keuangan” (LS 203).



Sumber: kekunaan.blogspot.com

Program tak efisien Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memicu pemborosan sumber daya, dikarenakan ditemukannya banyak kasus terjadinya kegagalan proyek ini. Makanan basi, makanan berulat, juga makanan yang tidak layak dikonsumsi ini sudah pasti dibuang dan akan menjadi sampah yang akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan kemudian muncul penyakit. Selain itu dari sisi moral, program ini terkesan sangat “mubazir“. Seharusnya anggaran program ini dialihkan ke bidang pendidikan agar masyarakat Indonesia lebih memiliki mentalitas ilmiah dan rasional.

Sikap Uskup Agung Ende dalam hal ini sangatlah tepat, dikarenakan keberlangsungan hidup, kultur, dan mata pencaharian masyarakat haruslah diutamakan ketimbang nafsu yang hanya akan menguntungkan sesaat, dan berujung kehancuran serta penyesalan dikemudian hari. Allah memerintahkan kita untuk menghormati segala makhluk. Dengan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk, termasuk kepada alam! Injil ingin mengajarkan bagi kita bagaimana rahmat Allah yang sungguh besar menitipkan manusia sebagai pengelola alam ini karena kita adalah citra-Nya. Jika manusia merusak alam, maka manusia merusak martabatnya sendiri dan dengan demikian ia telah berdosa terhadap dirinya sendiri, alam dan bahkan terhadap Allah.

Adanya kriminalisasi aktivis ini merupakan tindakan yang sangat mencederai nilai-nilai Pancasila yang ada, serta memalukan bagi negara demokrasi. Pada masa Prapaskah ini, marilah kita merendahkan diri dan mengakui dosa-dosa kita terhadap alam ciptaan.

Marilah bersama-sama merawat alam, dan juga melindunginya. Mari kita jaga Bumi kita.

Pax Vobis!

Penulis : Yosef Rayrego, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang


Sastra
Civitas

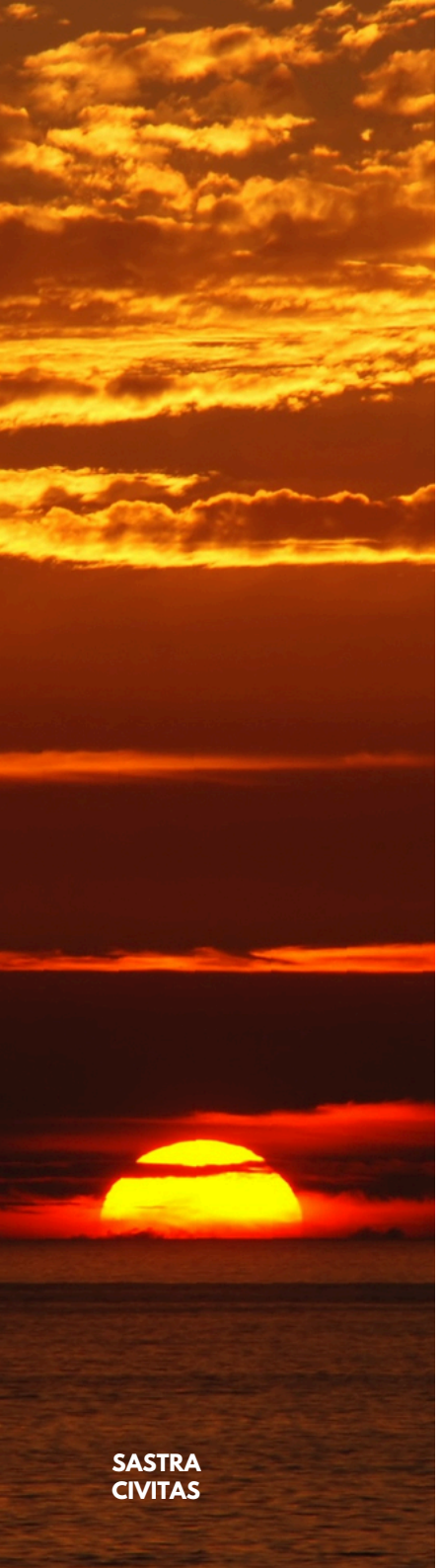

Manggala

Karya: Nabila Putri Larasati

Tibaku membahagiakan
Tibaku mengundang haru

Masa jaya kurasakan
Rasa cinta kasih utama untukku
Tak ada getir yang dirasa
Tak juga dengki yang menguar

Entah kemana musnahnya
Kurasa hanya angin laku
Tanggung jawab menindihku
Rasa enggan mengandangi

Berkarut ku rasa
Tak ingin mencicipi lagi
Tapi siapa diriku
Menerima lantang kupaksakan

Mi Amor

Karya:

Kita berada pada dimensi yang sama

Pada waktu dan masa dimana kita bisa bertegur sapa

Tapi ada kalanya rasa membuat kita putus asa

Latar waktu yang berbeda

Cinta yang tumbuh tak semestinya

Aku kehilangan cinta, di mana aku mulai mencinta

Kita adalah satu dari buah cinta yang salah waktu





Aku

Karya: Nanda Ainun Najwa

Pada aku yang belum bisa apa-apa
Pada aku yang belum bisa jadi sempurna
Dan aku yang tak pernah lelah untuk mencoba

Banyak harap yang tak bisa diutarakan
Banyak yang sudah terlewati walau penuh tekanan
Terima kasih karena sudah bertahan
Semoga aku bisa terus berjalan.

Dua Jiwa

Karya:

Matahari telah pergi
Menyisakan gelap malam yang sunyi
Di sini aku berdiri
Memandang cermin yang
menampakkan dua wajah

Satu tersenyum, satu bersembunyi
Sang pahlawan beraksi, penuh percaya
diri
Sang bayangan terluka, tak terhenti
Dia alter ego yang terpendam

Menampakkan rapuh dalam pelukan
kesedihan
Berbisik lembut menguatkan hatiku
"Semua akan baik-baik saja, aku akan
melangkah bersamamu"

Kepada semesta aku terlihat utuh
Namun dalam jiwa, ada banyak luka
yang dalam
Keduanya berjuang melewati gelap dan
terang

Seperti bayangan yang tak terpisah
Kedua jiwa ini bersatu dalam langkah
Pergi mendampa pada harapan dan
rasa

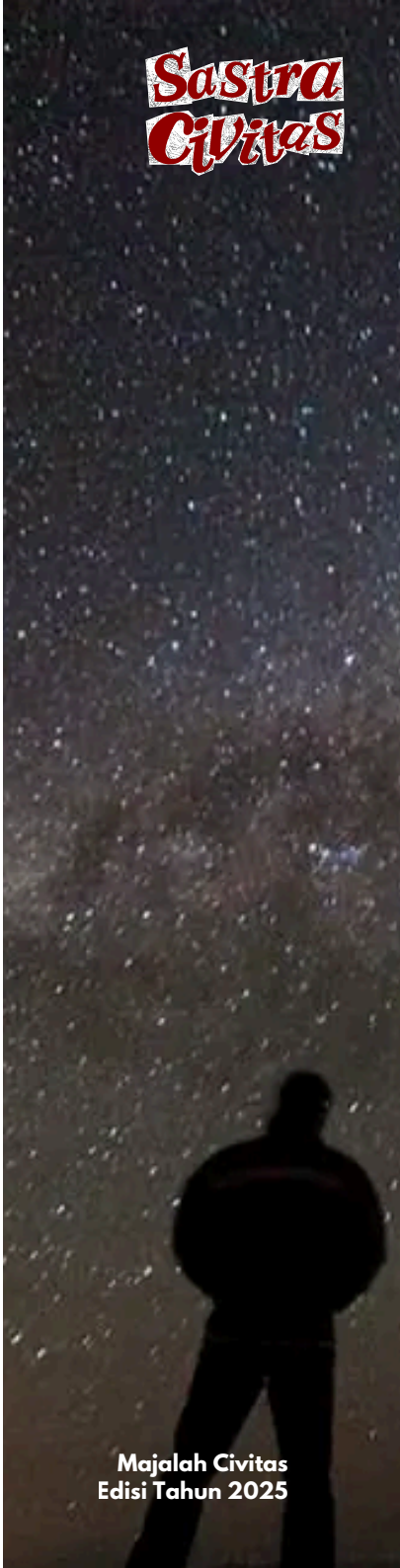



@mediacivitas
civitaslpm@gmail.com
https://lpmcivitas.wordpress.com

UNIT KEGIATAN PERS MAHASISWA CIVITAS
Basement III Keuangan dan Perbankan
Universitas Merdeka Malang
Jalan Terusan Raya Dieng No.57
Telp : 0895397691329